

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Alma (2009: 18) BMT (*Baitul mal wa tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

Menurut Alma (2009: 18) dua fungsi BMT yang utama yaitu sebagai *Bait Al Maal*, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana *non profit*, sepertihalnya *zakat*, *infaq*, dan *sadaqoh*. Menurut Alma (2009: 17) Pasang surut perkembangan *Baitul mal wa tamwil* di Indonesia tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Diantaranya yang paling krusial adalah landasan hukum yang belum jelas. Karena sebagian besar BMT memiliki badan hukum koperasi, maka secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung. BMT harus mensyaratkan keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani, atau menjadikan nasabah tersebut sebagai calon anggota selama beberapa waktu tertentu. Konsekuensinya, tidak saja sebagian nasabah yang menjadi enggan, tetapi juga menyebabkan masalah internal di dalam BMT karena setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Sementara, bila BMT ingin dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung, maka BMT harus berganti status hukum menjadi bank atau lembaga keuangan bukan bank, seperti modal ventura. Konsekuensinya, BMT justru akan kehilangan kelebihan utama mereka sebagai lembaga keuangan usaha berskala mikro dan kecil.

Ketidakpastian hukum yang melanda BMT ini menjadi salah satu alasan peneliti menjadikan objek penelitian pada BMT. Peneliti menjadikan BMT pada kota Salatiga sebagai lokasi penelitian karena terjadi penggelapan dana investasi

pada November 2014 oleh salah satu koperasi di Salatiga yaitu Koperasi Gajah Artha yang akan dijelaskan pada latar belakang penelitian ini.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pada November 2014 Mantan Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Salatiga, Petrus Yustinus Parito, melaporkan dugaan penggelapan di Koperasi Gajah Artha, Jalan Jendral Sudirman, ke Polres Salatiga. Parito melaporkan tiga perkara dugaan penggelapan yang diatur Pasal 374 KUHP. Laporan pertama hari Kamis, ia melaporkan dugaan pemotongan saldo simpanan sebesar Rp 30,8 juta tanpa sepengetahuannya. Laporan kedua, tentang penggelapan Sisa Hasil Usaha KSU sebesar Rp 382 juta yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Terakhir, laporan dugaan penggelapan dana asuransi jiwa sebesar Rp 8 juta. "Saya membuat tiga laporan dan saya sudah diperiksa dan di-BAP (berita acara pemeriksaan) atas laporan-laporan itu," ujar Parito. Pun demikian dengan masalah-masalah lainnya seperti SHU yang tidak dibagikan, dan lainnya. Menurut Parito, meski mempunyai beberapa pengurus, namun dalam praktiknya KSU Gajah Artha seakan-akan dimiliki dan dikelola sebagaimana perusahaan pribadi oleh Jencien Restantio selaku bendahara koperasi. (suaramerdeka.com).

Pada bulan Juni 2011 terjadi kasus penggelapan dana investasi pada dana yang terkumpul di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Hal ini membuktikan bahwa kecurangan akuntansi dapat terjadi di badan berbentuk koperasi sekalipun. Kementerian Koperasi sedang menunggu hasil audit akuntan publik untuk mendalami penggunaan dana yang dikumpulkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Hal itu terkait tiga petinggi grup Cipaganti yaitu Andianto Setiabudi, Yulinda Tjendrawakti dan Djulia Sri Rejeki yang menjadi tahanan Mapolda Jabar karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana ribuan mitra usaha (www.kompas.com).

Kasus buruknya pengendalian internal pada suatu perusahaan yang menyebabkan terjadinya kecenderungan terhadap kecurangan akuntansi yang merugikan banyak pihak terutama investor yang tertipu oleh baiknya laporan

keuangan pada perusahaan tersebut yang sebenarnya laporan tersebut hanyalah manipulasi belaka. Bahkan menurut Halim Alamsyah selaku Deputy Gubernur BI mengatakan lemahnya pengendalian internal dan kurang optimalnya manajemen risiko membuat fenomena pembobolan bank menjadi sering terjadi. Salah satu media informasi yang sangat penting untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang wajar adalah laporan keuangan yang penyajiannya memenuhi standar akuntansi yaitu wajar, relevan, dan transparan Mulyadi (1998) dalam Puspasari (2012). Laporan keuangan sebagai media pelaporan pertanggung jawaban kegiatan transaksi yang dilaporkan ke pihak pemegang saham harus dapat disajikan secara wajar. Kenyataannya, seiring perkembangan dunia usaha yang sedemikian kompleks dan bervariasi membuat kemajuan dibidang ekonomi cenderung diiringi dengan munculnya kejahatan-kejahatan, seperti kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut menuntut para auditor khususnya harus dapat memahami kecurangan yang terjadi.

Rezaee (2002) dalam Puspasari (2012) menyatakan bahwa dalam dua dekade terakhir *financial statement fraud* telah meningkat secara substansial. Tindakan kecurangan pada laporan keuangan memberikan keuntungan bagi para pelaku bisnis karena mereka dapat melebihkan hasil usaha serta kondisi keuangan mereka sehingga laporan keuangan mereka terlihat baik dalam pandangan publik. Tindakan kecurangan laporan keuangan mengakibatkan kerugian pada pihak pengguna utama laporan keuangan yang sangat menggantungkan pengambilan keputusan mereka berdasarkan laporan keuangan. Pengguna utama laporan keuangan adalah pemegang saham, investor, dan kreditor. *Financial statement fraud* sebagai suatu kesengajaan atau kecerobohan baik berupa tindakan yang disengaja maupun kelalaian yang mengakibatkan kekeliruan bersifat material pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan mengandung informasi yang menyesatkan.

Meningkatnya berbagai kasus skandal akuntansi di dunia menyebabkan berbagai pihak berspekulasi bahwa manajemen telah melakukan kecurangan pada laporan keuangan. Indonesia merupakan negara yang juga terkena wabah

meluasnya kasus skandal kecurangan akuntansi. Pada tahun 2014 *score* Indonesia dalam *Corruption Perception Index* (CPI) adalah 3,4 dari total *score* 10 dan menempati posisi 107 dari 175 negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi (*Transparency International*, 2014). Maraknya skandal kecurangan akuntansi di Indonesia dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, dan manipulasi pajak.

Inkonsistensi terhadap hasil penelitian pada pengaruh pengendalian internal juga melatar belakangi dijalankannya penelitian ini. Terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki kesimpulan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi namun juga terdapat juga hasil penelitian yang membuktikan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian pengaruh pengendalian terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Inkonsistennsi tersebut bisa dilihat pada Bab dua pada bagian penelitian terdahulu.

Kasus-kasus yang terjadi menuntut para auditor internal dan eksternal untuk dapat memahami kecurangan pada laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan merupakan masalah yang serius sehingga auditor sebagai pihak yang bertanggung jawab harus dapat mendeteksi aktivitas kecurangan sebelum akhirnya berkembang menjadi skandal akuntansi yang sangat merugikan. Pada suatu entitas hendaknya terdapat suatu fungsi untuk melaksanakan tindakan pencegahan, investigasi, dan pemeriksaan forensik dalam setiap pemeriksaannya untuk mendeteksi kecurangan agar tidak merugikan banyak pihak yang bergantung pada laporan keuangan. Dalam melakukan tindakan pencegahan, pendeteksian, dan investigatif yang bertujuan untuk meminimalisir kecurangan.

Menurut Amrizal (2004) dalam Arfah (2011) *fraud* sering terjadi apabila pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar atau tidak efektif, pegawai diperkerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas

mereka kemudian pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan, model manajemen melakukan *fraud*, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat pada hukum dan peraturan yang berlaku, pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang harus dipecahkan, masalah keuangan, masalah kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan dan Industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi terjadinya *fraud*.

Dengan struktur pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia yang didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil yang mencapai 51,2 juta unit atau mencapai 99,91% dari pelaku usaha di Indonesia, tidak heran dalam beberapa dekade terakhir ini berkembang dengan pesat lembaga-lembaga keuangan mikro. Di sektor keuangan mikro syariah, lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal dengan nama *Baitul mal wa tamwil* (BMT) saat ini memainkan peran yang cukup signifikan. Namun begitu, sampai saat ini tidak ada data yang akurat mengenai jumlah BMT dan persebarannya. Sementara itu BMT link (2010) memperkirakan jumlah BMT tahun 2006 sebesar 3.200 dengan jumlah nasabah sebanyak 3 juta orang, kemudian sampai akhir tahun 2010 akan tumbuh menjadi sekitar 5.200 BMT untuk melayani nasabah 10 juta orang. Pusat Inkubator Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK- Departemen UMKM dan Koperasi) sampai akhir tahun 2007 memperkirakan jumlah BMT di Indonesia sebanyak 4.000 BMT dengan aset sekitar Rp 1,5 triliun (PINBUK, 2008). Dengan semakin berkembangnya BMT maka akan membuat badan ini menjadi kompleks dan membutuhkan sistem pengendalian internal yang lebih kuat dan lebih kompleks untuk mempertahankan badan ini serta dalam rangka memenuhi tujuan organisasi. Pada sangat ditekankan nilai-nilai islami yang dijunjung tinggi pada setiap lembaga atau perusahaan. Hal ini menandakan bahwa lingkungan pengendalian sangat diperhatikan sedangkan pada *COSO* menyatakan bahwa lingkungan pengendalian paling utama dalam lima kerangka pengendalian yang ada pada *COSO*. Hal tersebut menjadi salah satu peneliti melaksanakan penelitian ini karena meskipun dalam sangat mengutamakan lingkungan pengendalian pada saat

ini namun pada kenyataannya BMT masih memiliki pengendalian internal yang kurang kuat.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions (COSO)* komponen yang saling terkait dalam pengendalian internal yaitu: *Control Environment, Risk Assessment Control Activities Information and communication Monitoring*. Penggunaan kerangka pengendalian *COSO* dikarenakan *COSO* telah menemukan bahwa proses audit terlalu sempit berfokus pada akuntansi keuangan dan mengabaikan “lingkungan kontrol” yang lebih luas, lingkungan yang mewadahi keputusan manajemen dan akuntansi. *COSO* berpendapat bahwa lingkungan kontrol memiliki “dampak yang pervasif” pada cara penyajian laporan keuangan (Sawyer: 2005). Selain itu, *COSO* didukung atau disponsori oleh lima badan yaitu *American Institute of Certified Public Accountants, Institute of Internal Auditors, American Accounting Association, Financial Executives Institutes, Institute of Management Accountants*.

Usaha mikro, kecil, dan menengah juga berperan dalam memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Berdasarkan data BPS (2009), populasi usaha kecil dan menengah (UKM) jumlahnya mencapai 52,7 juta unit atau 99,9 % dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air. UKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 97,3 persen.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan UMKM**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>
2008	51.409.612 unit	94.024.278 orang
2009	52.764.603 unit	96.211.332 orang
2010	53.823.732 unit	99.401.775 orang
2011	55.206.444 unit	101.722.458 orang
2012	56.509.765 unit	112.765.988 orang

**sumber:** Kemenkop dan UMKM

Potensi lainnya dapat dilihat dan kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB menurut harga berlaku, yang sesuai data BPS tahun 2008 mencapai Rp.2.609,4 trilyun. Dengan jumlah tersebut berarti bahwa 55,56% dan PDB nasional yang totalnya mencapai Rp.4.696,5 trilyun bersandar pada produktivitas UMKM. Jumlah tersebut terus meningkat. Data tahun 2009 menyebutkan bahwa UMKM berkontribusi sebesar 56,53% terhadap pembentukan PDB menurut harga berlaku. Angka tersebut menjadi 57,12% di tahun 2010.

**Tabel 1.2**  
**Kontribusi UMKM Terhadap Pembentukan PDB**

<b>Tahun</b>	<b>Kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB</b>	<b>Jumlah kontribusi UMKM terhadap PDB</b>
2008	55,56%	2.609,4 trilyun
2009	56,53%	2.993,1 trilyun
2010	57,12%	3.466,3 trilyun
2011	57,94%	4.303,5 trilyun
2012	59,08%	4.869,5 trilyun

**Sumber:** Kemenkop dan UMKM

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, keterlibatan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian pada BMT yang memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas bahwa pelaku UMKM menjadikan BMT sebagai alternatif baru untuk memperoleh dana atau modal untuk menjalankan usahanya dan pada saat ini BMT yang terdaftar di Indonesia semakin meningkat sehingga peran BMT juga semakin besar dirasakan oleh pelaku UMKM untuk keperluan usahanya seperti memperoleh modal. Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang dilakukannya penelitian ini. Jika fungsi pengendalian internal dapat berjalan baik dalam BMT maka peran BMT untuk mengembangkan UMKM akan lebih baik dan selain itu fungsi pengendalian internal juga membantu mengurangi risiko kecurangan yang ada dimana kecurangan tersebut juga akan merugikan UMKM. Jika kualitas pengendalian internal pada BMT dapat berjalan baik maka dipastikan UMKM yang ada pasti diharapkan dapat berkembang dengan baik dan PDB yang diperoleh akan semakin meningkat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan dari berbagai temuan yang ada, kecurangan laporan keuangan merupakan suatu tindakan yang merugikan banyak pihak dan termasuk tindakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu peneliti ingin membahas bahwa pentingnya pengendalian internal di dalam perusahaan sehingga meminimalisir tindakan kecurangan laporan keuangan dan mendapatkan solusi dari kurangnya pengendalian internal. Dilatarbelakangi oleh masalah yang ada maka peneliti memberi judul skripsi yaitu Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada *Baitul mal wa tamwil* di kota Salatiga).

Ketidakpastian hukum yang melanda BMT ini menjadi salah satu alasan peneliti menjadikan objek penelitian pada BMT. Peneliti menjadikan BMT pada kota Salatiga sebagai lokasi penelitian karena terjadi penggelapan dana investasi pada November 2014 oleh salah satu koperasi di Salatiga yaitu koperasi Gajah Artha.

### 1.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah disini adalah merumuskan masalah menjadi objek penelitian dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada penulis maupun pembaca tentang masalah yang dihadapi objek penelitian tersebut. Maka rumusan masalah yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengendalian Internal pada *Baitul mal wa tamwil* yang di kota Salatiga?
2. Seberapa besar pengaruh secara simultan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada *Baitul mal wa tamwil* di kota Salatiga?
3. Sebarapa pegaruh secara parsial :
  - a. Seberapa besar pengaruh secara parsial pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada *Baitul mal wa tamwil* di kota Salatiga?
  - b. Seberapa besar pengaruh secara parsial pengaruh penilaian resiko terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada *Baitul mal wa tamwil* di kota Salatiga?
  - c. Seberapa besar pengaruh secara parsial pengaruh aktivitas pengendalian terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada *Baitul mal wa tamwil* di kota Salatiga?
  - d. Seberapa besar pengaruh secara parsial pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada *Baitul mal wa tamwil* di kota Salatiga?
  - e. Seberapa besar pengaruh secara parsial pengaruh pemantauan (*monitoring*) terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada *Baitul mal wa tamwil* di kota Salatiga?

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengendalian Internal pada *Baitul mal wa tamwil* dan di kota Salatiga.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada *Baitul mal wa tamwil* dan di kota Salatiga.
3. Seberapa pengaruh secara parsial :
  - a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada *Baitul mal wa tamwil* di kota Salatiga.
  - b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial pengaruh penilaian resiko terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada *Baitul mal wa tamwil* di kota Salatiga.
  - c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial pengaruh aktivitas pengendalian terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada *Baitul mal wa tamwil* di kota Salatiga.
  - d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada *Baitul mal wa tamwil* di kota Salatiga.
  - e. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial pengaruh pemantauan (*monitoring*) terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada *Baitul mal wa tamwil* di kota Salatiga.

### **1.5 Manfaat penelitian**

- a. Bagi penulis

Dengan tersusunnya skripsi ini, manfaat bagi penulis sendiri adalah dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang pentingnya pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi terutama pada *Baitul mal wa tamwil*.
- b. Bagi perusahaan

Dengan hasil penelitian ini, maka manfaat bagi perusahaan, badan atau entitas menjadikan dasar pemikiran yaitu pentingnya pengendalian internal dan membuat keputusan yang tepat bagi pihak

pengambil keputusan agar dapat dicapainya tujuan perusahaan secara efektif, efisien dan ekonomis.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai khasanah perpustakaan dan memberikan wawasan terhadap para pembaca yang membutuhkan, serta diharapkan dapat memberikan ide-ide untuk penelitian yang akan datang.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi :

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan ini berisi gambaran secara umum dari penelitian ini, latar belakang objek penelitian memberikan gambaran umum mengenai objek yang menjadi objek dari penelitian ini, latar belakang penelitian mencakup dasar argumentasi teoritis yang disertai dengan fenomena yang menjadikan alasan dalam pengajuan penelitian ini, perumusan masalah mencakup latar belakang dari penelitian ini, tujuan penelitian merupakan harapan penulis dari hasil penelitian ini, kegunaan penelitian merupakan harapan penulis dimana hasil dari penelitian ini memiliki arti terhadap bidang ilmu yang bersangkutan baik dari segi teoritis maupun terapannya dan sistematika penulisan secara umum.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka Dan Lingkup Penelitian**

Bab tinjauan pustaka dan lingkup penelitian ini mencakup rangkuman teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, selain itu pada bab ini juga akan dibahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka penelitian, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitiannya.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode yang akan digunakan pada penelitian ini. Pada bab ini mencakup antara lain jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

#### **BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang pembahasan dan analisis yang dilakukan sehingga akan jelas gambaran permasalahan yang terjadi dan hasil dari analisis pemecahan masalah.

#### **BAB V : Kesimpulan Dan Saran**

Bab kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan akhir dari analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat dimanfaatkan oleh para investor ataupun oleh peneliti selanjutnya.